

**Papua dalam semiosfer Kota Yogyakarta**  
*Papua in the semiosphere of Yogyakarta City*  
Bagus Aji Waskyto Sugiyanto<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Widya Mataram

<sup>1)</sup>Jln. Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kota Yogyakarta

Diserahkan 16 Agustus 2021 / Disetujui 27 Maret 2022

**ABSTRACT**

*This paper aims to find out how the semiosphere boundary is defined for Papuan students in Yogyakarta. The nickname of the city of Yogyakarta as a miniature of Indonesia actually needs to be questioned again. The unfavorable relationship between the Yogyakarta community and Papuan students recently required a study of cultural meaning to be able to find out the root of the problem. By using Juri Lotman's model of cultural semiotics, this study finds the boundaries that are central and peripheral to the Yogyakarta semiosphere. Analysis of the Yogyakarta semiosphere boundary shows that there are forms of marginality among Papuan students. Papuan students are still in outer space or peripherals in the Yogyakarta semiosphere, while the core is the symbols of "Indonesian and Javanese".*

**Keywords:** Cultural semiotics, Semiosphere, Peripherals, Yogyakarta, Papuan students

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan batas semiofer pada mahasiswa Papua di Yogyakarta. Julukan kota Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia ternyata perlu dipertanyakan ulang. Hubungan yang kurang baik antara Masyarakat Yogyakarta dan Mahasiswa Papua pada akhir-akhir ini memerlukan sebuah kajian pemaknaan budaya untuk dapat mengetahui akar permasalahannya. Dengan menggunakan semiotika budaya model Juri Lotman, penelitian ini menemukan batas yang menjadi pusat dan periferal pada semiofer Yogyakarta. Analisa pada batas (*boundary*) semiofer Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi bentuk-bentuk marginalitas pada mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua masih merupakan *outer space* atau periferal dalam semiofer Yogyakarta, sedangkan yang menjadi pusat (*core*) adalah simbol-simbol "Ke-Indonesia dan Jawa-an".

**Kata Kunci:** Semiotika budaya, Semiosfer, Periferal, Yogyakarta, Mahasiswa Papua

---

\*Korespondensi Penulis  
Email: bagusajy89@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota yang plural. Sifat pluralisme ini sendiri sebenarnya sudah mengakar sejak jaman dahulu. Merunut pada penataan dan penamaan daerah di Yogyakarta seperti, Kranggan di utara Tugu dan Pecinan di selatan Malioboro yang didiami oleh orang-orang beretnis Tionghoa, Sayidan tempat tinggal etnis Arab, Menduran menjadi tempat tinggal orang-orang berdarah Madura, Bugisan menjadi daerah orang-orang beretnis Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya (Gupta et al., 2007; Sumintarsih & Adrianto, 2014). Keanekaragaman ini juga yang membuat Yogyakarta dikenal juga sebagai kota budaya. Makna budaya di sini diterjemahkan oleh (Ferry, 2019), bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki falsafah *Petruk kanthong bolong*. Makna falsafah ini adalah orang yang selalu “*nulung marang sesami, ora nganggo mikir wayah, waduk, kantong. Yen ana isi lumuntur marang sesami*”. Secara analogis dapat digambarkan sebagai kantong bolong, maka apa pun yang masuk ke dalam kantong yang diterima dari limpahan anugerah Tuhan akan mengalir terus ke sesama manusia. Dengan kata lain, *Semar kanthong bolong* adalah konsep ajaran humanis yang toleran dan terbuka sesamanya. Konsep ini merupakan cerminan kebhinekaan, ini adalah modal bangsa Indonesia. Tentu saja modal tersebut tidak akan terwujud bila tercerai berai atau bahkan dijadikan sebagai sumber kerusuhan rasial (Marta, 2017).

Falsafah *Semar kanthong bolong* akhir-akhir ini sedang diuji. Konflik sosial yang berlandaskan etnis sedang marak terjadi di Yogyakarta, khususnya dengan etnis Papua. Menurut liputan oleh BBC, mahasiswa Papua kerap mengalami kesulitan ketika mencari kamar kos, padahal terdapat tulisan “masih ada kamar kosong” di pagar rumah kos tersebut. Diskriminasi ini disebabkan oleh stereotipe yang buruk terhadap etnis Papua, mereka kerang dipandang suka mabuk-mabukan, suka membuat kerusuhan, tidak membayar saat makan (Bbc.com, 2016). Tidak hanya masyarakat Yogyakarta, terdapat sekelompok oknum aparat negara (yang seharusnya menjadi pelindung warganya) memiliki cara pandang yang serupa. Pada tanggal 26 April 2016 aparat melakukan pengepungan terhadap asrama Papua di Jalan kusumanegara Yogyakarta dengan menggunakan persenjataan lengkap, padahal pada waktu itu mahasiswa Papua berencana menyelenggarakan pentas seni dan budaya untuk memperingati hari kematian budayawan Papua, Arnold C. A (Rappler.com, 2016).

Problematika ini semakin kompleks dengan realitas politik yang menghinggapi masyarakat Papua. Penelitian Suryawan (2013) memperlihatkan adanya fakta, bahwa Papua pernah menjadi negara merdeka secara *de facto* tetapi karena kepentingan geopolitik antara Indonesia, Amerika, Belanda, dan Australia maka integrasi dilakukan. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab (dalam bahasa) (Meteray, 2012), masyarakat Papua memiliki “nasionalisme ganda”. Sebuah sikap penyangkalan diri terhadap eksistensi Papua dari bagian Indonesia. Drooglever (2010) melihat masalah nasionalisme ganda ini akibat dari kegagalan Indonesia dalam membangun kontruksi nasionalisme bagi bangsa Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Masuknya Papua ke dalam Indonesia dengan “paksaan” membuat masyarakat Papua hidup dalam keadaan yang tidak pernah tenang, berbeda dengan beberapa daerah lain seperti (semisal) Yogyakarta, yang proses penyatuan terhadap Indonesai melalui proses perjanjian yang terlegitimasi (Poerwokoesoemo, 1984).

Masyarakat Papua yang tinggal di Yogyakarta sendiri didominasi oleh mahasiswa. Mereka mendiami beberapa asrama dan indekos yang tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta. Pada konteks inilah ruang pertemuan budaya terjadi, antara mahasiswa Papua dan masyarakat Yogyakarta yang berada di dekat hunian mahasiwa Papua. Kedekatan wilayah menjadi faktor utama kedua belah pihak (masyarakat sekitar hunian dan Mahasiswa Papua) berinteraksi. Hasil olah interaksi inilah yang menyebabkan munculnya kesepahaman, pembelajaran atas perbedaan budaya. Tidak heran jika kita melihat mahasiswa Papua yang ikut gotong royong dalam kegiatan desa sekitar asramanya atau msasyarakat Yogyakarta yang asik bercengkrama dengan mahasiswa Papua. Kedua belah pihak telah berhasil melakukan asimilasi budaya yang

konstruktif. Gambaran positif mahasiswa Papua juga dapat kita dengar dari kisah Hairus Salim, direktur *Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)*. *LKIS* merupakan organisasi nirlaba independen dengan memiliki misi mewujudkan tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan, kemajemukan, dan ke-Indonesian. Hairus menceritakan dalam sebuah program untuk memperkenalkan kemajemukan kepada anak-anak SD di Yogyakarta, *LKIS* mengajak beberapa mahasiswa Papua, karena keterbatasan kendaraan dan konsumsi, *LKIS* hanya dapat mengajak 4 mahasiswa saja. Tetapi saat hari kegiatan berlangsung, ternyata mahasiswa Papua yang datang lebih banyak dan para mahasiswa tersebut saling berbondong-bondong, “*Enggak usah Bapak pikir soal transportasi dan konsumsi. Kami bisa urus itu sendiri. Kitorang senang dengan ini acara,*” kata salah satu mahasiswa Papua saat melihat kekhawatiran *LKIS* soal logistik yang kurang (Cnnindonesia.com, 2016).

Penelitian dengan tema budaya mahasiswa Papua di Yogyakarta masihlah minim dilakukan. Hasil pencarian dengan kata kunci "mahasiswa Papua di Yogyakarta" melalui laman Garuda (pangkalan jurnal Nasional) menunjukkan terdapat 3 temuan dokumen. Hal ini menunjukkan, rendahnya minat kajian terhadap kehidupan mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penelitian pertama oleh Moh Rafli Abbas dengan judul “kontruksi identitas ke-Papua-an di kota multi kultural (refleksi kota Yogyakarta dalam kajian identitas)” ini dilakukan pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana komunitas mahasiswa Papua membangun identitas ke-Papua-an di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil analisis didapatkan identitas Ke-Papua-an komunitas Papua yang berada di Yogyakarta dibangun atas dasar kehidupan beragama dan bernegara. Dalam hal ini, konstruksi identitas Papua berasal dari pengaruh agama dan negara. Kedua faktor tersebut telah menjadi dasar bagi pembentukan identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta. Selain itu, komunitas Papua di Yogyakarta sangat menyadari perbedaan yang mencolok secara fisik. Komunitas Papua di Yogyakarta berpendapat bahwa orang Papua yang memiliki ciri fisik telah menjadi pemersatu dan menjadi indikator dari munculnya identitas Ke-Papua-an komunitas Papua di Yogyakarta. Ekspresi identitas Ke-Papua-an cukup banyak dimunculkan oleh komunitas Papua di ruang publik. Komunitas mahasiswa Papua mengekspresikan identitas Ke-Papua-annya melalui keikutsertaan dalam berbagai acara, terutama yang berhubungan dengan pentas kebudayaan, pertandingan-pertandingan olahraga, dan acara lainnya yang mengusung kebudayaan khas Papua (Abbas, 2016).

Penelitian kedua dilakukan oleh Sindi Monica Putri, Weli Febrianto dan Yosephine Susanto yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta”. rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk memaparkan urgensi Yogyakarta menjadi kota ramah HAM.. Hasil yang ditemukan adalah Citra Yogyakarta sebagai kota yang peduli akan HAM dan memiliki toleransi tinggi berbanding terbalik dengan fakta yang ada di masyarakat. Banyak isu-isu intoleransi dan pelanggaran HAM seperti diskriminasi, rasisme, kekerasan dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta adalah menjadikan kota Yogyakarta sebagai Kota Ramah HAM. untuk menjadi kota ramah HAM, harus dimulai dengan kesadaran segala lapisan masyarakat yang ada di Yogyakarta termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Karena peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam kota ramah HAM ini, terutama Kepala daerah. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil tindakan konkrit untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota ramah HAM (Putri et al., 2020).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fred Keith Hutubessy dan Jacob Daan Engel tahun 2019. Penelitian yang berjudul “Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua” ini bertujuan untuk menemukan motif pergerakan mahasiswa Papua dan pergerakan sakralitas-nasionalisme yang tumbuh dalam diri mereka. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dilakukan dengan membangun resistensi terhadap konstruksi nasionalisme Indonesia. Hal itu dilakukan komunitas pergerakan

melalui pemetaan musuh dalam melakukan perlawanan. Peran kapitalisme, imperialisme dan militerisme diidentifikasi sebagai musuh yang dengan sengaja dibentuk oleh penguasa (pemerintah Indonesia) untuk mendominasi bangsa Papua. Sakralitas sebagai bangsa Papua dianggap sebagai nasionalisme yang sesungguhnya ketimbang yang dikonstruksikan oleh penguasa di Indonesia (Hutubessy & Engel, 2019).

Pada penelitian 1 dan 3 terlihat adanya kesamaan bahwa identitas mahasiswa Papua di Yogyakarta tidak lepas dari akar sejarah bangsa Papua yang penuh dengan problematika politik. Yang dalam bahasa Meteray (2012) adalah “nasionalisme ganda”. Selain itu, keduanya juga menggunakan mahasiswa Papua sebagai perpektif utama. Yang membedakan keduanya melihat dari identitas yang berbeda. Penelitian pertama melihat pada identitas etnisitas sedangkan penelitian 3 melihat dari identitas politik. Perpektif bergeser dalam penelitian kedua yaitu, pada masyarakat dan pemerintah daerah Yogyakarta. Kelemahan ketiga penelitian ini masih melihat sebuah budaya dalam kacamata yang mono atau tunggal. Dalam artikel ini, perpektif yang digunakan adalah budaya biner, atau dialog antar budaya. Budaya tidak dilihat sebagai ruang yang tertutup tetapi terbuka. Oleh karena itu penting melihat dari perspektif keduanya (mahasiswa Papua dan Masyarakat Yogyakarta) berdialog dalam menemukan titik temu. Proses pemahaman interaksi budaya perlu dikaji dengan konsep semiosfer, yang di dalamnya kita dapat melihat multidimensional antar entitas sistem semiotik (Jawa dan Papua) berhubungan

Mengenai pembahasan dialog antar budaya (budaya biner), Juri Lotman mengaitkannya dengan konsep semiosfernya. Menurutnya budaya tidak ada yang tersistem secara tertutup dan tersistem secara mandiri, oleh karena itu budaya hendaknya dipahami sebagai bagian dari kontinum semiotik yang diisi dengan semiotik beraneka ragam formasi (J. Lotman, 1997, 2000; J. Lotman & Clark, 2005). Hal ini berarti bahwa proses yang terjadi dalam kontinum semiotik tidak pernah "monostruktural", tetapi memerlukan partisipasi setidaknya dua sistem yang berbeda (binarisme, dalam kasus ini Jawa dan Papua). Setiap proses semiotik dengan demikian mengambil bentuk dialog. Sebagai ruang dialog, sistem biner menampilkan dirinya pada pandangan orang pertama (dalam Lotman diistilahkan *I* atau *He*) sebagai konstruksi paradoks yang terdiri dari “setidaknya dua mekanisme semiotik (bahasa) yang berada dalam hubungan saling tidak dapat diterjemahkan, namun pada saat yang sama serupa, karena melalui mekanisme mereka sendiri. artinya masing-masing memodelkan satu dan realitas ekstrasemiotik yang sama” (J. Lotman, 1997). Konsekuensi terhadap munculnya sistem biner dalam proses semiotik antar budaya menimbulkan pertanyaan terkait batasan mengenai sistem biner itu sendiri. Di sini Lotman menjelaskan dalam sebuah semiosfer terdapat batas (*borders*) yang memungkinkan kedua sistem semiotik berhubungan (Monticelli, 2019). Dalam hubungan tersebut kedua sistem semiotik itu mengalami negosiasi, penolakan, ataupun penerimaan dalam pemaknaan semiotik antar sistem. Dari latar belakang tersebut maka Tujuan yang ingin dicapai pada artikel ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pemaknaan batas (*boundary*) semiofer pada mahasiswa Papua di Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell berpandangan, (Mujahidah & Jaunedi, 2021) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh secara holistik pemahaman mengenai problematika manusia, dengan konteks sosial yang melingkupinya sebagai upaya untuk menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan terperinci dari para sumber informasi. Teknisnya, penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan (*field research*).

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan semiotika budaya Juri Lotman (*Tartu-Moscow-Semiotic School*) yang memberi perspektif luas dalam menelaah teks karena bersifat “*textocentrist*”. Bagi Lotman, definisi teks lebih luas dari sekadar literatur, melainkan mencakup budaya, yaitu representasi pikiran (Semenenko, 2012). Lotman dan Mazhab Tartu-Moscow-

Semiotic School mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang sistem dan proses tanda (Kull, 2015; Y. M. Lotman, 1990), di mana pendekatannya terhadap budaya bersifat holistik (Torop, 2005). Mazhab ini memandang budaya sebagai teks yang sangat kompleks, sebuah representasi pikiran (Semenenko, 2012) di mana kode kait-mengait, membentuk hubungan dan struktur baru. Lebih lanjut, dikatakan bahwa analisis teks adalah bagian dari identifikasi dan transmisi proses budaya (Kull, 2015; Novikova & Chumakova, 2015; Semenenko, 2012). Semiotika Lotman melakukan analisis teks dengan menghubungkannya dengan konteks budaya yang lebih luas (Lorusso, 2015; Nazaruddin, 2019).

Lokasi penelitian bertempat di Arama Papua Kamasan 1 yang merupakan asrama Papua pertama di Yogyakarta. Sebagai asrama mahasiswa Papua tertua di Yogyakarta, tempat ini dinilai penulis sebagai tempat yang representatif dalam pemenuhan data penelitian karena sudah menjadi ruang semiosis antar budaya (Papua dan Jawa) sejak dahulu. Sehingga sudah terdapat semiosfer budaya dalam ruang tersebut. Dalam proses pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan 4 metode: *focus group discussion* (FGD) dengan para penghuni Arama Papua Kamasan 1, wawancara dengan warga sekitar Arama Papua Kamasan 1 dalam kurun waktu 2 bulan (Januari-Februari 2020), observasi, pencatatan lapangan, dan pengumpulan arsip historis.

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan perangkat analisis semiotika model Juri Lotman pada konsep batas (*boundary*) dalam semiosfer. Konsep-konsep tersebut adalah,

1. Deskripsi Diri  
Deskripsi diri adalah mekanisme semiotik yang memisahkan/defensif dan mengkonstruksi batas. Menarik garis pemisahan yang jelas antara ruang internal dalam proses penerjemahan yang utuh dan ruang eksternal yang tidak dapat diterjemahkan (J. Lotman, 2000).
2. Mekanisme Bilingual  
Batas sebagai mekanisme bilingual berfungsi untuk menghubungkan sistem semiotik yang berbeda dan membuka ruang untuk berinteraksi (J. Lotman, 2000).
3. Periferal  
Lotman mendeskripsikan periferal sebagai "zona netralitas struktural", yang masih bebas dari fungsi deskripsi diri. Dalam periferal bahasa adalah milik bersama. Terdapat ketergabungan dua entitas sistem semiotik (Kull, 2015; Andrew, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Papua dalam periferal Semiosfir Pendidikan dan Semiosfer Bahasa di Yogyakarta

Yogyakarta sebagai semiosfer merupakan ruang yang luas cakupannya. Dalam kajian semiosfer, Yogyakarta tidak hanya dianggap sebagai sebuah nama kota, tetapi merupakan ruang kontestasi antar semiofer yang berada di dalamnya. Dalam kaitannya pada penelitian ini, peneliti melihat semiosfer pendidikan adalah aspek krusial yang berelasi dengan semiosfer mahasiswa Papua. Argumentasinya adalah migrasi masyarakat Papua ke Yogyakarta tidak lain bertujuan untuk menuntut ilmu/kuliah. Baik melalui jalur pembiayaan mandiri ataupun beasiswa pemerintah/swasta. Hasil *FGD* dengan mahasiswa Papua di Arama Papua Kamasan 1 juga menyuarakan hal yang sama. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah pendidikan di Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai kota memiliki sebuah sejarah yang panjang terkait pendidikan. Tepatnya dimulai dari periode tahun 1800-1900 (abad 19), pada periode waktu tersebut pendidikan diselenggarakan oleh pihak kerajaan (Kraton) yang dilakukan di kraton. Guru/pengajarnya adalah kerabat kerajaan dan tokoh agama, pada saat ini akses pendidikan diperuntukkan anak-anak bangsawan dan rakyat jelata yang bertempat tinggal di sekitar

kerajaan. Materi ajarnya adalah kebatinaan, perilaku, dan etika (Suwondo, 1977). Seiring berkembang waktu muncul juga berbagai instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 dan Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pada tanggal 3 Maret 1946 Presiden pertama Indonesia Soekarno meresmikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang merupakan cikal bakal Universitas Gadjah Mada (UGM). Perubahan nama itu tertuang pada tertuang pada PP No.23 tahun 1949 (Sugiyanto, 2004). Dengan PP yang dikeluarkan oleh Soekarno, UGM resmi menjadi universitas pertama di Indonesia.

Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan yang telah disebutkan di atas pada awalnya bukanlah serta-merta berperan pada ranah pendidikan. Terdapat arus politik kebangsaan dalam pendirian insitusi-institusi pendidikan tersebut. Institusi-institusi pendidikan yang muncul di Yogyakarta hadir untuk menandingi institusi pendidikan kolonial Belanda (Kurniawati, 2012). Lebih lanjut keadaan politik pasca kemerdekaan Indonesia yang belum stabil membuat pemimpin Indonesia saat itu menandatangani berbagai perjanjian (linggarjati dan Renville) yang menyebabkan perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Yogyakarta, sekaligus diikuti gelombang pengungsi perang dari berbagai elemen (termasuk kaum cendekia) yang berpindah ke kota ini (Ricklef, 2016).

Oleh karena rekam sejarah tersebut Yogyakarta bukanlah merupakan tempat yang asing bagi pendatang yang ingin tinggal di kota tersebut. Dengan kondisi zaman yang sudah berbeda, pada pendatang di Yogyakarta bukanlah para pengungsi perang, tetapi orang yang ingin belajar/kuliah. Dilansir dari *Kompas.Com* pada 2013 terdapat 500 asrama mahasiswa daerah yang berada di Yogyakarta Yogyakarta (Kompas.com, 2013). Diantara ratusan asrama mahasiswa daerah tersebut, terdapat beberapa yang diperuntukan untuk mahasiswa Papua. Salah satunya Asrama Papua Kamasan 1 yang menjadi lokasi penelitian ini.

Hasil *FGD* dengan mahasiswa Papua di Asrama Papua Kamasan 1 memperlihatkan mahasiswa Papua melihat Yogyakarta memiliki fasilitas pendidikan yang sudah sangat maju ketimbang di Papua. Baik dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Beberapa dari mahasiswa Papua mencoba untuk memberikan gambaran kepada peneliti dengan membandingkan fasilitas sekolah yang ada di Papua. Gambaran itu adalah bangunan sekolah yang masih belum beratap, guru yang terbatas jumlahnya, dan suasana pengajaran yang masih jauh dari kata baik. Keadaan ini yang menyebabkan ada masalah komunikasi ketika mereka berkuliah di Yogyakarta. Standar perkuliahan di Yogyakarta adalah menggunakan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (eyd), berbeda dengan di Papua, pengajaran di sana menggunakan Bahasa Indonesia berdialek Papua. Bahasa Indonesia berdialek Papua adalah bahasa Indonesia yang mengalami kodifikasi ulang aturan kerja kebahasaannya (yang resmi menurut aturan eyd) dan perubahan kata. Sebagai contoh kalimat “*ka sudah mandi kah?*” yang berarti, “kamu sudah mandi belum?” atau “*ko antar sa ke sini kah?*” artinya, “kamu bisa mengantarkan saya ke sini tidak?”. Mahasiswa Papua menggunakan bahasa Indonesia berdialek Papua ketika berbicara dengan sesama mahasiswa Papua, mereka tidak menggunakan bahasa daerah karena di Papua sendiri memiliki ratusan jenis bahasa daerah yang berbeda-beda. Di sisi lain penggunaan bahasa Indonesia dengan dialek Papua sering terbawa dalam ruang-ruang yang bersifat publik seperti ruang perkuliahan, imbasnya adalah kesalahan interpretasi dari lawan bicaranya (dengan orang Jawa). Terbawanya bahasa Indonesia berdialek Papua hingga ke ruang publik dikarenakan faktor kebiasaan dan pemahaman akan bahasa yang mereka gunakan sudah benar (biasa dialami oleh mahasiswa yang baru saja datang di Yogyakarta). Hal ini seperti diutarakan oleh Abdul:

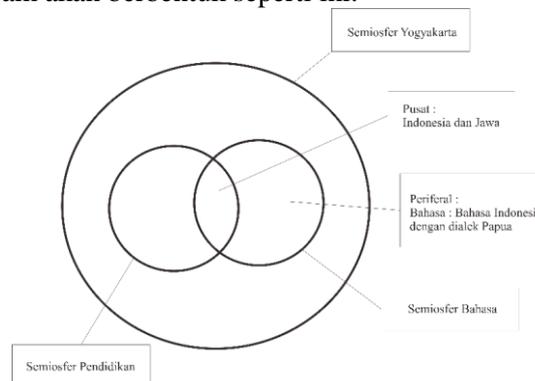
*“Masalah bahasa itu memang benar. Bahasa kami sering terbawa ke luar (ruang publik), ya kebiasaan atau yang pakai bahasa adalah adik kami yang baru datang ke Yogya. Kami beri pemahaman baru pada adik-adik kami pada masalah bahasa... ini*

*penting untuk dipahami oleh kami semua, agar mereka nanti bisa mengajar pada adik-adik yang baru.” Abdul, Mahasiswa berasal dari Papua.”*

Kendala bahasa dalam perkuliahan juga yang membuat mereka merasa terkucilkan dalam pergaulan di tempat kuliah. Mahasiswa Papua merasa penggunaan bahasa lokal (Jawa) merupakan kendala yang harus mereka alami, terkadang mereka berhadapan dengan kondisi pengguna bahasa lokal yang meluas pada ruang publik. Karena kurangnya pemahaman akan bahasa lokal dan kurangnya rasa toleran dari pengguna bahasa lokal, membuat interaksi antara mahasiswa Papua dan Jawa jarang terjadi. Hal ini terbukti saat ada tugas kuliah dalam bentuk kelompok, mahasiswa Papua sering dihindari oleh mahasiswa Jawa. Mahasiswa Papua memahami hal tersebut walaupun keadaan tersebut membuat mereka terkadang sakit hati, seperti yang diungkapkan oleh Andi sebagai berikut,

*“Ya saya memahami mereka (mahasiswa Jawa) tidak ingin berkelompok dengan kami karena masalah bahasa. Walaupun kami juga tidak memahami bahasa mereka (bahasa Jawa), tapi kami mencoba memahami keadaan ini, walau kadang sakit (sambil menunjuk hati). Ya kami ini pendatang.” Andi Mahasiswa Papua.*

Dari pernyataan Andi di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara semiosfer bahasa bahwa bahasa Indonesia berdialek Papua berada pada batas periferal. Sedangkan bahasa Jawa dan Indonesia berada pada inti. Dengan kata lain tindakan diskriminatif pada mahasiswa Papua dalam perkuliahan disebabkan bertemunya semiosfer pendidikan dengan semiosfer bahasa. Jika dibuat diagram akan berbentuk seperti ini.



**Gambar 1. Semiosfir Pendidikan dan Semiosfer Bahasa**

Sumber : Olahan Peneliti

### **Papua dalam periferal Semiosfir Politik dan Semiosfer Budaya di Yogyakarta**

Permasalahan politik antara Papua dan Pemerintah Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta. Walaupun permasalahan sudah berlangsung sejak periode awal Indonesia merdeka hingga saat ini, sepertinya kata penyelesaian masih sangat jauh dari harapan. Pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah Indonesia acapkali meninggalkan permasalahan HAM di Papua. Theo Van Den Broek dengan penelitian yang cermat mengidentifikasi 5 pelanggaran ham yang terjadi di Papua, 1. Kekerasan terhadap individu; 2. Kekerasan terhadap masyarakat pada suatu daerah; 3. Kekerasan psikologis; 4. Kegiatan bisnis yang berpotensi melanggar HAM; 5. Kekerasan struktural yaitu kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi melanggar HAM (2004). Oleh karena itu, para mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta kerap menyuarakan aspirasi

politiknya. Sebagai putra daerah mereka mengaku tidak mungkin melupakan tanah kelahirannya walaupun sedang tidak berada di sana, seperti yang diutarakan David.

*“Sebagai anak Papua kami merasa terpanggil untuk menyuarakan keadilan. Agar mereka (masyarakat luas) tahu, bahwa Papua sedang menderita... itu juga yang menjadi tujuan kami kuliah, untuk membuat Papua yang lebih baik.” David Mahasiswa Papua.*

Hubungan Papua dengan Negara Indonesia yang penuh dengan gejolak politik juga menimbulkan kegamangan identitas atau menurut Meteray (2012), masyarakat Papua memiliki “nasionalisme ganda”. Sebuah sikap penyangkalan diri terhadap eksistensi Papua dari bagian Indonesia. identitas yang rapuh ini yang membuat mahasiswa Papua bersikap antipati terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.

Menurut mereka pemerintah belum dapat memberikan kesejahteraan pada bumi Papua dan tidak memberikan ruang untuk berdialog. Keadaan ini bukan berarti dapat disimpulkan Mahasiswa Papua di Yogyakarta sepakat untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia, menurut hasil *FGD* penulis dengan para peserta, mereka lebih ingin mengutamakan cara dialog dengan pemerintah Indonesia. Dialog ini yang diharapkan menimbulkan kesepakatan yang konstruktif bagi penyelesaian konflik di Papua, seperti yang dikatakan Ani salah satu mahasiswa Papua yang merupakan aktivis pergerakan,

*“Kami tergabung dalam aliansi mahasiswa yang mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah Papua. Tidak dengan cara anarkis... Ya kami mengutamakan daerah kami dahulu ketimbang kebijakan pemerintah, ini masalah yang sudah ada sejak Papua masuk ke Indonesia. Masalah yang membuat integrasi Papua dan Indonesia belum selesai.” Ani, Mahasiswi berasal dari Papua.*

Menjadi aktivis pergerakan adalah langkah yang dilakukan para mahasiswa Papua untuk terlibat dalam penyelesaian masalah di Papua. Tetapi cara ini tidak mendapatkan dukungan oleh beberapa elemen masyarakat di Yogyakarta. Pada tahun 2016 pernah terjadi pengurangan selama dua hari di Asrama Papua Kamasan 1. Di kutip dari *cnnindonesia.com*, pada awalnya mahasiswa Papua merencanakan sebuah *long march* sebagai bagian dari aksi damai guna mendukung *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang merupakan organisasi lintas pemerintah di kawasan Pasifik selatan, tetapi kegiatan ini urung dilaksanakan karena akses keluar asrama diblokir oleh pihak Polisi, yang mengamankan dari kepungan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang membawa senjata tajam dan meneriaki para penghuni asrama dengan ucapan rasial (Kusumadewi, 2016). Sebuah pengalaman yang buruk ini menimbulkan rasa trauma yang besar bagi penghuni asrama. Mereka merasa dianggap sebagai warga kelas kedua (*second class*) karena bentuk marginalisasi yang terjadi pada mereka.

Bagi mahasiswa Papua marginalisasi kepada mereka pada bidang politik berkelindan juga dengan stereotip negatif yang dilekatkan pada mereka. Gambaran masyarakat Papua pada media yang penuh dengan narasi konflik (baik politik ataupun fisik) membuat masalah Papua tidak pernah dilihat secara komprehensif. Terdapat detil-detil yang dihilangkan dan ditonjolkan.. Sebagai contoh adalah cerita David seperti berikut ini,

*“Kami rasa semua adalah gambaran buruk yang dilekatkan ke kami oleh berita, kami merasa gambarannya tidak utuh, kami yang selalu disalahkan.” David, Mahasiswa Papua.*

Melihat hubungan pemberitaan media dan stereotip buruk pada Papua bukanlah hal baru. Dalimunthe dengan menggunakan teori Stuart Hall membagi 3 bentuk stereotip media, yaitu, 1) stereotip dalam praktiknya tertutup dan dikecualikan. Dalam hal ini, suku Papua

dikucilkan dan tidak diberi ruang oleh media untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, karena seringkali diwakili oleh elit tertentu, seperti kepala daerah atau polisi; 2) Stereotip mengurangi, esensial, menaturalisasi, dan membangun perbedaan. Etnis Papua direduksi oleh media sebagai kelompok marginal dan memperbaiki perbedaan tersebut dengan berbagai cara, seperti melalui bahasa dalam pemberitaan; 3) Stereotip cenderung terjadi di mana ada ketidaksetaraan kekuasaan. Perilaku media semacam ini juga memperkuat asumsi tentang ironi demokrasi dalam praktik media yang seolah-olah menjadi agen dalam mereproduksi wacana-wacana tertentu, seperti isu suku Papua (Dalimunthe & Irawanto, 2020).

Implikasi framing media yang buruk, ternyata juga terdapat pada benak masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta seringkali bersikap rasial kepada mahasiswa Papua contoh seperti tidak menerima mahasiswa Papua untuk mendiami Indekosnya, menjauhi atau tidak ingin berinteraksi ketika bertemu di tempat umum, menghindari satu kelompok tugas di saat perkuliahan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dapat kita pahami dari pernyataan David di bawah ini,

*“Kami pernah mengantar teman untuk mencari kost-kostan dan itu sangat sulit. Pemilik kost bilang, kamar kostnya sudah penuh. Padahal di depan gerbang kost ditulis masih ada kamar kosong. Kami merasa sedih, karena sering terjadi. pernah saat kami sedang makan di warung, lalu mereka (sesama pembeli bersal dari Jawa) langsung pulang atau pindah tempat duduk. Ya itu dulu sebelum covid ya. Dari raut muka mereka terlihat takut, jijik karena melihat kami... kami pernah juga saat membuat tugas di salah satu kontrakan teman kami di usir oleh warga (desa setempat). Alasan mereka karena kami berisik dan akan mabuk-mabukan. Padahal sudah dijelaskan, tapi ya kami menerima saja, sebagai pendatang.” David, Mahasiswa Papua.*

Jika melihat penjelasan David tersebut terdapat batas periferal mahasiswa Papua pada semiosfer kebudayaan Yogyakarta. Sebagai kota yang diberi cap miniatur Indonesia ternyata dalam realitanya masih belum memiliki simbol multikultur dalam pusat semiosfernya. Masih terdapat penyekatan terhadap suatu kebudayaan, atau meletakkan batas periferal pada kebudayaan Papua. Hal ini termaktub dalam kata-kata David *“ya kami menerima saja, sebagai pendatang”*, pemahaman David menunjukkan masih belum adanya integrasi dalam semiosfer kebudayaan Yogyakarta. tidak heran jika dalam keseharian mahasiswa Papua lebih sering berinteraksi dengan sesamanya, ketimbang dengan lingkup masyarakat yang lebih luas.

Terdapat eksklusivitas yang terbuka dalam semiosfir kebudayaan Papua di Yogyakarta. Keterbukaan ini lebih diakitkan dengan kemiripan fisiologis dengan etnis tertentu. Memang, mahasiswa Papua melihat pada fisiologi tubuh yang berbeda antara Papua dan Jawa. Warna kulit dan bentuk wajah merupakan simbol pembeda antara Papua dan Jawa, tetapi simbol-simbol fisiologi ini tidaklah terlalu kaku, terdapat pencairan batas pada suatu etnis yang menyerupai dengan secara bentuk muka dan warna kulit. Etnis-etnis tersebut biasanya terletak dekat dengan daerah yang dekat dengan Provinsi Papua, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Andi salah satu Mahasiswa Papua,

*“Ya tentu dari fisiknya. Kami beda dengan Jawa...Kami tidak memisahkan diri ya. kadang beberapa teman daerah lain juga bermain bola bersama, makan bersama, minum (alkohol) bersama, tidur juga di sini. Mereka sudah kami anggap saudara kami di sini” Andi, Mahasiswa semester akhir berasal dari Papua.*

Anggapan “saudara” menunjukkan secara batas etnis pada mahasiswa Papua tidaklah kaku. Batas konsep diri Papua tidak sepenuhnya secara hakikat murni, terdapat pembauran di dalamnya. Keadaan ini juga “diamini” oleh mahasiswa yang berasal dari daerah lain, bagi

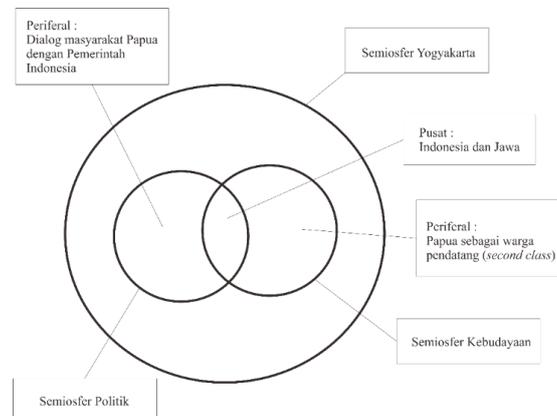
mereka mahasiswa Papua merupakan “saudara” dan tidak berbeda. Bahkan mereka menciptakan sebuah konsep diri secara kolektif yang mereka namakan sebagai “Bangsa Timur”.

*“Saya bukan berasal dari Papua, tapi Halmahera Utara (Maluku Utara). Tapi kita sama-sama sebagai bangsa Timur.” Banu, Mahasiswa berasal dari Maluku Utara.*

Mahasiswa Papua juga rutin bermain sepakbola untuk menghibur diri, yang penulis kategorikan sebagai ruang semiosfer budaya. Kegiatan sepakbola ini memang sudah menjadi tradisi pada Arama Papua Kamasan 1. Gunanya merupakan pembentukan solidaritas antar sesama penghuni asrama. Sese kali waktu mereka mengajak *sparring* mahasiswa dari asrama sesama “Bangsa Timur”. Selain itu pada semiosfer budaya kita dapat melihat pada pertunjukan pentas seni Papua yang rutin diadakan oleh penghuni asrama. Para mahasiswa Papua mengekspresikan identitas lokalitasnya pada acara tersebut. Tidaklah heran jika memang tujuan kegiatan ini agar para Mahasiswa Papua tidak lupa tentang budaya daerahnya (Papua), seperti yang dikatakan Abdul sebagai berikut,

*“Kami rutin mengadakan pentas seni di asrama ini...macam-macam bentuknya, ada tarian, nyanyian, makanan, pakaian juga. Tapi saat ini susah, karena covid ya...sebagai pemersatu mahasiswa Papua, agar tidak lupa dengan Papua.” Abdul, Mahasiswa semester akhir berasal dari Papua.*

Semiosfer kebudayaan yang masih tersekat-sekat ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta belum bisa dikatakan kota plural. Stereotip negatif yang melekat pada mahasiswa Papua memang benar adanya. Apakah ini imbas politik? Dengan problematika konflik yang berkepanjangan antara Papua dan pemerintah Indonesia, eksisnya mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta memiliki cara pandang identitas yang ganda atau nasionalisme ganda. Dengan sifat dualitas identitas ini, menimbulkan juga cara pandang dari masyarakat Yogyakarta yang penuh akan kecurigaan, diskriminasi, ketakutan, ketidakpercayaan pada mahasiswa Papua. Jika digambarkan dalam diagram semiosfer akan terlihat seperti ini.



**Gambar 2. Semiosfer Politik dan Semiosfer Budaya**

Sumber : Olahan Peneliti

### **Papua dalam Semiosfer Yogyakarta**

Selanjutnya penulis akan menjabarkan konsep batas/*boundary* dari Lotman pada dialog budaya biner (Yogyakarta dan Papua) yang terjadi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Lotman menjelaskan terdapat tiga konsep batas/*boundary* dalam semiosfer, yaitu deskripsi diri (pusat/*core*), mekanisme bilingual (sistem-sistem semiofer), dan periferal (*outer*

*space*). Konsep-konsep tersebut bersifat komplementer. Tidak mungkin suatu konsep batas berdiri sendiri (*independen*). Kemungkinan suatu semiosfer tercipta dari keutuhan dalam ketiga konsep tersebut.

Proses mekanisme bilingual yang terjadi pada sistem semiotik Papua dan Yogyakarta terdapat pada berbagai sistem semiosfer. Sistem semiosfer tersebut adalah semiosfer “pendidikan dengan bahasa” dan semiosfer “politik dengan budaya”. Pada mekanisme bilingual dapat dilihat proses bertemunya “Yogyakarta dan Papua” dijembatani oleh sistem semiosfer-semiosfer tersebut. Dialog yang tercipta di kedua entitas semiosfer (Yogyakarta dan Papua) tersebut yang menciptakan kontestasi dalam semiofer.

Pertemuan antar sistem semiotik (mekanisme bilingual) inilah yang menciptakan keadaan deskripsi diri (*core*) dan periferal (*outer space*) dalam semiosfer. Pada deskripsi diri semiosfer Yogyakarta berpusat (*core*) pada simbol “Indonesia dan Jawa”. Imbasnya dapat kita lihat pada analisis semiosfer bahasa dan pendidikan, penggunaan Bahasa Indonesia dengan *eyd* secara sehari-hari yang ditempatkan pada posisi pusat menyebabkan mahasiswa Papua menjadi kesulitan dan termarginalisasi dalam ruang-pendidikan. Begitu juga dalam semiosfer budaya dan politik. Penempatan Indonesia dan Jawa sebagai pusat menyebabkan mahasiswa Papua menganggap dirinya bukan sebagai penghuni Yogyakarta tetapi sebagai “pendatang”. Identitas pendatang ini ditimbulkan dari keadaan proses nasionalisasi Ke-Indonesiaan yang semu.

Menempatkan simbol Indonesia dan Jawa sebagai pusat (*core*) membuat sistem semiotik Papua berada dalam posisi yang lemah. Akibat yang ditimbulkan keadaan ini adalah penolakan atas sistem semiotik Papua, dengan kata lain sistem semiotik Papua berada dalam posisi periferal (*outer space*) dalam semiosfer Yogyakarta. Sebagai contoh dalam analisis ditemukan penggunaan Bahasa Indonesia dengan dialek Papua tidak pernah dianggap sebagai suatu pola komunikasi yang umum dalam ruang publik di Yogyakarta. Selain itu pemahaman warga Yogyakarta terkait problematika politik yang terjadi di Papua juga belumlah utuh. Memposisikan warga Papua adalah pemberotak terhadap Negara Indonesia. Hal tersebut bertalian dengan stereotip buruk warga Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua.

## SIMPULAN

Analisa pada batas (*boundary*) semiosfer Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi bentuk-bentuk marginalitas pada mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua masih merupakan *outer space* atau periferal dalam semiofer Yogyakarta, sedangkan yang menjadi pusat (*core*) adalah simbol-simbol “Ke-Indonesia dan Jawa-an”. Pada konteks semiosfer pendidikan dan semiosfer bahasa ditemukan relasional yang terpisah bagaimana mahasiswa Papua dengan keterbatasan pemahaman kebahasaan Indonesia yang sesuai dengan *eyd* dan bahasa lokal mengalami kecerabutan dalam pusat semiosfer. Penggunaan bahasa Indonesia berdialek Papua menjadi penghalang mereka dalam memasuki semiosfer pusat. Implikasinya muncul dalam marginalitas mahasiswa Papua dalam ruang pendidikan, baik pembelajaran ataupun pergaulan kampus. Sedangkan pada semiosfer politik dan semiosfer kebudayaan bentuk yang serupa juga didapati oleh mahasiswa Papua di Yogyakarta. Permasalahan politik yang berkepanjangan antara Papua dan pemerintah Indonesia menjadi konteks utama. Perbedaan cara dalam menyelesaikan masalah diantara keduanya (*militeristik vs dialog*) membuat titik temu keduanya tidak ditemukan. Implikasi dari hal tersebut menimbulkan nasionalisme ganda pada mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta juga sendiri belum dapat menciptakan kondisi yang menjadi jargon kotanya, yaitu “miniatur Indonesia”. multikulturalisme masih jauh ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Papua.

Kondisi ini jika tidak dilanjutkan dengan serius akan menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak diharapkan di masa depan. Alih-alih menjadi miniatur Indonesia, Yogyakarta saat ini telah

menjadi salah-satu kota yang intoleran di Indonesia. oleh karena itu, kajian semiotik Juri Lotman pada aspek budaya dapat memberikan sebuah pencerahan dalam menemukan kontestasi antar budaya yang ada. Penelitian ini sendiri masih memerlukan tinjauan yang berbeda untuk melengkapi permasalahan budaya di Yogyakarta. sebagai contoh penelitian dalam perspektif orang Jawa/Yogyakarta dapat untuk melengkapi data temuan pada penelitian ini, ataupun meneliti semiosfer mahasiswa perantauan yang lainnya juga dapat memberikan penjelasan komprehensif dalam kajian semiosfer Yogyakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. R. (2016). Konstruksi identitas ke-papua-an di kota multi kultural (refleksi kota yogyakarta dalam kajian identitas. *Politik Profetik*, 04(1), 1–19.
- Bbc.com. (2016). *Mereka Tidak Menerima Kos untuk Anak Papua*.  
[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160714\\_trensosial\\_papua](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160714_trensosial_papua)
- Cnnindonesia.com. (2016). *Berlimpah Cinta dari Yogya untuk Papua*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808204823-20-150017/berlimpah-cinta-dari-yogya-untuk-papua>
- Dalimunthe, M. A., & Irawanto, B. (2020). *Representation of Papuan Identity in the Reporting of Local Newspapers in Yogyakarta*. 2(3), 34–44.
- Drooglever, P. J. (2010). *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Kanisius.
- Ferry, T. I. (2019). *Forum Mangunwijaya 2018 Post-Truth dan (Anti) Pluralisme*. Penerbit Buku Kompas.
- Gupta, D., Handayani, T., Arch, M., Harnoko, D., & Pratiwi, Y. (2007). *No Title*. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.
- Hutubessy, F. K., & Engel, J. D. (2019). Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 77.  
<https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47468>
- Kompas.com. (2013). Pertahankan “Indonesia Mini” di Yogyakarta. *Kompas Online*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta?page=all>
- Kull, K. (2015). A semiotic theory of life: Lotman’s principles of the universe of the mind. *Green Letters*, 19(3), 255–266. <https://doi.org/10.1080/14688417.2015.1069203>
- Kurniawati, S. (2012). *Membangun (?) Narasi, Menghadirkan Pesona Akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta*. Ombak.
- Kusumadewi, A. (2016). Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama>
- Lorusso, A. M. (2015). Unity and Pluralism: The Theory of Jurij Lotman. *Cultural Semiotics*, 67–115. [https://doi.org/10.1057/9781137546999\\_3](https://doi.org/10.1057/9781137546999_3)
- Lotman, J. (1997). *Culture as Subject and Object of itself*. Trames.
- Lotman, J. (2000). *Universe of The Mind*. Indiana University.
- Lotman, J., & Clark, W. (2005). On the semiosphere. *Sign Systems Studies*, 33(1), 205–229.  
<https://doi.org/10.12697/sss.2005.33.1.09>

- Lotman, Y. M. (1990). *Universe of The Mind A Semiotic Theory of Culture*. I.B TAURIS & CO.LTD Publisher.
- Marta, R. F. (2017). *Realitas Dan Media Sebagai*. 3(1), 1–12.
- Meteray, B. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Kompas Media Nusantara.
- Monticelli, D. (2019). Borders and translation: Revisiting Juri Lotman’s semiosphere. *Semiotica*, 1–18. <https://doi.org/10.1515/sem-2017-0125>
- Mujahidah, N. H., & Jaunedi, F. (2021). Audience Reception See the Role of Gender Assesed to Woman Characters in Bumi Manusia Film. *Bricolage : Magister Ilmu Komunikasi*, 7(1), 95–104.
- Nazaruddin, M. (2019). Tartu-Moscow Semiotic School and the Development of Semiotic Studies in Indonesia. *Asian Journal of Media and Communication*, 3(2), 51–58.
- Novikova, A. A., & Chumakova, V. P. (2015). Yuri Lotman’s cultural semiotics as a contribution to media ecology. *Explorations in Media Ecology*, 14(1), 73–85. [https://doi.org/10.1386/eme.14.1-2.73\\_1](https://doi.org/10.1386/eme.14.1-2.73_1)
- Poerwokoesoemo, S. (1984). *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Putri, S. M., Febrianto, W., & Susanto, Y. (2020). Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta. *Jurist-Diction*, 3(1), 331. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17639>
- Rappler.com. (2016). *Kronologi Tindakan Represif terhadap Mahasiswa Papua di Yogyakarta*. <https://www.rappler.com/indonesia/140261-kronologi-represi-aparat-papua-yogyakarta> July 20, 2021 at 08.00
- Ricklef, M. C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Semenenko, A. (2012). The Texture of Culture. In *The Texture of Culture*. <https://doi.org/10.1057/9781137008541>
- Sugiyanto. (2004). Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif. *Cakrawala Pendidikan*, 23(3), 523–547.
- Sumintarsih, & Adrianto, A. (2014). *Dinamika Kampung Kota Prawirotaman dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Suryawan, I. N. (2013). *Jiwa Yang Patah*. Kepel Press.
- Suwondo, B. (1977). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Torop, P. (2005). Semiosphere and/as the research object of semiotics of culture. *Sign Systems Studies*, 33(1), 159–173. <https://doi.org/10.12697/sss.2005.33.1.06>
- Van den Broek Ofm, T. P. ., & Hermawan Ofm, J. B. (2004). *Memoria Passionis di Papua “Kondisi Sosial politik dan HAM 2002-2003.”* LSPP dan Keuskupan Jayapura.

